

MODEL PENGEMBANGAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN PADA KECAMATAN PERBATASAN NEGARA DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nawawi¹, Irfan Setiawan², Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng³,
Rahmawati Sururama⁴, Dedi Kusmana⁵

^{1, 2, 3, 4, 5}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno, KM. 20 Jatinangor, Sumedang, Indonesia
E-mail: m_nawawi@ipdn.ac.id¹, irfansetiawan@ipdn.ac.id², tjenreng@gmail.com³,
rahmawati_sururama@ipdn.ac.id⁴, dedi_kusmana@ipdn.ac.id⁵

ABSTRAK. Pengembangan desa pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan negara menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pengembangan desa pusat pertumbuhan di Kecamatan Perbatasan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dengan fokus pada Desa Entikong dan Desa Balai Karangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendukung pertumbuhan desa, seperti aksesibilitas, infrastruktur, potensi ekonomi, layanan publik, dan dukungan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Entikong dan Balai Karangan di Kabupaten Sanggau memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan. Entikong unggul dalam aksesibilitas karena keberadaan PLBN dan Jalan Lintas Negara, infrastruktur modern, serta aktivitas perdagangan lintas batas yang kuat. Balai Karangan juga berkembang melalui konektivitas regional, sektor perkebunan, UMKM, dan dukungan kebijakan pemerintah. Kedua desa memiliki layanan publik yang memadai serta program pemberdayaan dari pusat dan daerah. Dukungan infrastruktur, ekonomi lokal, dan pelayanan dasar yang baik mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial, menjadikan keduanya sebagai simpul strategis pembangunan perbatasan Kalimantan Barat. Model pengembangan desa pusat pertumbuhan yang diusulkan berbasis pada pendekatan 4M, yaitu Mengembangkan potensi perdagangan, Meningkatkan infrastruktur dasar, Memperkuat kelembagaan desa, dan Meningkatkan kualitas layanan publik. Implementasi model ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa perbatasan dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

Kata kunci: desa pusat pertumbuhan, perbatasan negara, pembangunan desa, model 4M.

VILLAGE DEVELOPMENT MODEL OF GROWTH CENTER IN BORDER DISTRICT IN SANGGAU REGENCY WEST KALIMANTAN PROVINCE

ABSTRACT. The development of growth center villages in border areas is a key strategy to enhance community welfare and equitable development. This study aims to analyze a development model for growth center villages in the border district of Sanggau Regency, West Kalimantan Province, focusing on Entikong and Balai Karangan Villages. Using a descriptive qualitative approach, the study identifies key factors supporting village growth, including accessibility, infrastructure, economic potential, public services, and government policy support. The findings show that both Entikong and Balai Karangan have strong potential as growth centers in border regions. Entikong excels in accessibility due to the presence of the Border Crossing Post (PLBN) and the National Cross-Border Road, along with modern infrastructure and robust cross-border trade activities. Balai Karangan has grown through regional connectivity, plantation-based economies, MSMEs, and policy support. Both villages have adequate public services and benefit from empowerment programs at both local and national levels. Strong infrastructure, local economic development, and public service provision have accelerated socio-economic growth, positioning both villages as strategic hubs for border area development. The proposed development model is based on the 4M approach: Maximizing trade potential, Modernizing basic infrastructure, Mobilizing village institutions, and Maximizing public service quality. The implementation of this model is expected to accelerate economic growth in border villages and foster more inclusive and sustainable development.

Key words: growth center village, border area, village development, 4M model.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, pengembangan pemerintahan di daerah perbatasan menjadi sebuah tantangan utama. Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai daerah perbatasan negara, memiliki karakteristik unik dan potensi yang dapat dikembangkan. Perhatian terhadap perbatasan negara tetap menjadi isu yang menuntut perhatian, karena wilayah perbatasan negara sering kali dipenuhi dengan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara pandang dan pendekatan yang inovatif terhadap perbatasan, untuk memperluas interpretasi terhadap sifat atau karakteristik perbatasan yang serba tafsir dan ambigu. Dalam kaitan ini, perlu diadopsi perspektif yang berbeda terhadap perbatasan, memandangnya sebagai konstruksi dinamis dan berkembang. Perbatasan tidak hanya dipandang sebagai suatu entitas yang statis atau pasti, dengan beragam masalah dan penanganannya, tetapi lebih sebagai suatu realitas yang terus berubah dan memiliki sifat yang multifaset. Daerah perbatasan harus dipahami sebagai ruang di mana komunitas atau masyarakat bertempat tinggal, bukan sekadar sebagai wilayah batas antara negara (Agnew, 2008).

Daerah perbatasan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, memiliki kondisi yang kompleks dan tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya. (Marihandono, 2010; Mahdi, 2016). Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Desa-desa di wilayah ini umumnya masih tertinggal dan belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi bagi wilayah sekitarnya.

Kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah di perbatasan antara negara yang berbeda dapat mengakibatkan munculnya ketidaksetaraan antara kedua wilayah perbatasan tersebut. Fenomena ini terlihat jelas di perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, Kabupaten Sanggau. Pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat di wilayah Sarawak, Malaysia, dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial di wilayah perbatasan (Johannes, 2019). Permasalahan sosial yang timbul tersebut memerlukan penanganan serius di tingkat kecamatan perbatasan. Pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan tata pemerintahan di dalam negeri.

Ketidaksetaraan ekonomi antara wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, khususnya di Entikong, Kabupaten Sanggau, menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat setempat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarawak menciptakan ketidakseimbangan yang memunculkan berbagai permasalahan, seperti disparitas penghasilan, tingkat kesejahteraan, dan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang lebih serius di tingkat kecamatan perbatasan guna mengatasi dampak sosial yang muncul akibat ketidaksetaraan pembangunan ekonomi di kedua sisi perbatasan (Johannes, 2019).

Selain itu, pengelolaan kawasan perbatasan tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kondisi politik dan pemerintahan yang ada di dalam negeri memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan pembangunan wilayah perbatasan. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait untuk menyusun strategi pengelolaan perbatasan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada pembangunan yang merata di kedua wilayah yang terlibat.

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan berbagai program pembangunan. Namun, program-program tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya model yang tepat untuk menentukan desa pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan. Meskipun Kabupaten Sanggau memiliki potensi pembangunan yang besar, belum ada kajian yang komprehensif dalam penentuan desa pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan ini. Kurangnya pemahaman mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan infrastruktur di desa perbatasan dapat menghambat efektivitas pembangunan pemerintahan kecamatan. Di daerah perbatasan Kabupaten Sanggau, perkembangan pemerintahan kecamatan menghadapi tantangan unik. Mobilitas penduduk, akses infrastruktur, dan potensi ekonomi merupakan faktor-faktor krusial yang perlu diperhitungkan.

Saat ini, ekonomi Kabupaten Sanggau masih kuat berkuat pada sektor primer, terutama dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meskipun sektor-sektor ini memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian lokal, namun ketergantungan yang tinggi pada sektor primer dapat menjadi risiko yang perlu diatasi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sanggau Tahun (2023), menguraikan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyumbang utama PDRB Kabupaten Sanggau, meskipun kontribusinya menurun dari 36,28% pada tahun 2020 menjadi 33,84% pada tahun 2022. Sektor Pertambangan dan Penggalian (24,14%) menempati posisi kedua, diikuti oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (10,75%). Sektor Jasa Lainnya (10,25%) dan Sektor Konstruksi (6,74%) melengkapi lima besar penyumbang PDRB.

Hal tersebut menandakan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor utama penggerak ekonomi Kabupaten Sanggau. Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun kontribusinya terhadap PDRB relatif kecil. Sektor Jasa Lainnya dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan diharapkan dapat menjadi sektor penopang ekonomi di masa depan.

Sejauh perbatasan negara itu secara tegas diakui dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan yang tegas, maka perbatasan negara merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayahnya (Arifin, 2014). Di Indonesia, pendekatan dalam penanganan perbatasan, masih lebih menggunakan pendekatan keamanan dan bersifat sentralistik (Fauzi, 2016). Hal ini ditandai begitu banyaknya pos-pos keamanan yang dibangun sepanjang perbatasan, utamanya pada jalur-jalur ilegal yang sering dilewati penduduk kedua negara. Begitupun dengan pembangunan kawasan perbatasan yang hanya berpusat di kota kecamatan yang dirancang dan di kelola oleh pemerintah pusat.

Kecamatan di kawasan perbatasan mempunyai beberapa tugas dan fungsi yang berhubungan dengan aparat kewilayahan di negara tetangga yang tidak termuat peraturan tersebut. Kecamatan di perbatasan negara merupakan unsur penting dalam kedaulatan negara, karena perbatasan merupakan salah satu manifestasi yang terpenting dari kedaulatan teritorial. Di Kabupaten Sanggau terdapat 2 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia yakni Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam. Luas Kecamatan Entikong sebesar 506,89km sementara kecamatan Sekayan sebesar 841,01 km². Kecamatan Entikong memiliki 4 desa yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, sementara Kecamatan Sekayam memiliki 3 Desa yang berbatasan langsung.

Di Kecamatan Entikong terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang merupakan tempat lalu lintas orang dan barang secara legal, namun demikian juga terdapat 19 jalan tikus (jalur ilegal) di Entikong yang rawan dilalui tanpa pelaporan (Tribunnews.com), yang panjangnya 129,5 km (15%) dari total panjang 877 km perbatasan di provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat di dusun-dusun perbatasan, seperti Desa Suruh Tembanwang dan Desa Palapasang di Kecamatan Entikong, cenderung memilih untuk menjual produk pertanian, perkebunan, dan hasil kerajinan mereka ke kampung-kampung di negara Malaysia yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dalam rentang waktu 30 hingga 60 menit. Sebaliknya, jika mereka hendak menuju pusat Kecamatan Entikong, perlu menempuh perjalanan yang cukup jauh, berkisar antara 4 hingga 6 jam dengan menggunakan perahu kecil (Setiawan; Madjid, 2022).

Pilihan masyarakat untuk bertransaksi dengan kampung-kampung di seberang perbatasan Malaysia mungkin disebabkan oleh aksesibilitas yang lebih mudah dan waktu tempuh yang lebih singkat. Dalam hal ini, transaksi lintas batas menjadi lebih praktis dan efisien. Di samping itu, perjalanan yang relatif singkat ke kampung-kampung seberang memudahkan aktivitas ekonomi, terutama dalam hal pemasaran produk pertanian dan kerajinan. Sebaliknya, perjalanan yang memakan waktu yang lebih lama jika mereka hendak menuju pusat Kecamatan Entikong dapat dianggap sebagai kendala dalam mengakses pusat ekonomi lokal. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan aksesibilitas antara wilayah perbatasan dan pusat kecamatan, yang mungkin berdampak pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan upaya untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke pusat-pusat ekonomi lokal guna mendukung perkembangan wilayah perbatasan secara seimbang.

Adapun fenomena lain yang terjadi di kawasan perbatasan Entikong adalah bahwa pembangunan yang dilakukan cenderung hanya dinikmati oleh penduduk yang berada di sekitar pusat kecamatan dan sepanjang jalur Entikong-Sekayam. Pelayanan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah pusat terfokus di kawasan tersebut, namun terpecah dalam beberapa instansi pusat maupun daerah yang berdiri sendiri. Pengelolaan perbatasan masih mengalami kelemahan dalam hal kelembagaan dan manajerial. Belum terbentuk suatu sistem, kebijakan, dan instrumen pengelolaan perbatasan negara yang bersifat terintegrasi. Sistem perencanaan yang komprehensif, baik dari segi sektoral maupun spasial, belum tersedia. Fenomena ini mencirikan adanya parsialitas, di mana kebijakan terkait pengelolaan kawasan perbatasan tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga.

Kelemahan yang tampak adalah kurangnya koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi (KISS) di dalam manajemen kawasan perbatasan. Banyak kementerian dan lembaga sektoral teknis belum terlibat secara langsung, menciptakan ketidaksinambungan dalam implementasi kebijakan. Hal ini tercermin dalam kurangnya keterlibatan dan kontribusi secara seragam dari berbagai instansi terkait dalam pengelolaan kawasan perbatasan (ugm.ac.id).

Situasi kesehatan di Desa yang tidak memiliki sarana kesehatan di Kecamatan Entikong pada tahun 2022 menunjukkan tantangan signifikan. Keterbatasan akses terhadap sarana kesehatan menjadi isu utama bagi masyarakat di wilayah tersebut. Desa-desa yang terpencil seringkali menghadapi kesulitan dalam mencapai layanan kesehatan terdekat, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pelayanan kesehatan bagi penduduk di pedalaman.

Ketidaksetaraan akses terhadap sarana kesehatan di Desa-desa tersebut juga dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kemudahan mencapai sarana kesehatan bagi Masyarakat desa menjadi suatu keharusan. Pemerintah daerah dan pihak terkait belum menyediakan alternatif pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau oleh warga Desa, seperti mobile clinic atau penyediaan puskesmas keliling, yang dapat memberikan layanan dasar kesehatan secara periodik.

Penetapan desa pusat pertumbuhan sebagai salah satu alternatif upaya penataan ruang di Kabupaten Sanggau merupakan langkah strategis untuk mengatasi sejumlah isu yang dihadapi, terutama pada pembangunan di daerah perbatasan negara. Konsep desa pusat pertumbuhan, sebagaimana dijelaskan oleh Taylor (1981), menawarkan potensi untuk menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi, sosial, dan infrastruktur bagi desa-desa sekitarnya. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi tantangan pembangunan yang dihadapi di wilayah tersebut.

Desa Entikong sedikit lebih berkembang dalam hal fasilitas dibandingkan dengan desa-desa perbatasan negara di Kecamatan Sekayam (Desa Bungkal, Lubuk Sabuk, dan Sei Tekam). Desa Entikong banyak didukung dengan proyek Pembangunan Kawasan Perbatasan di PLBN Entikong. Hal ini menandakan bahwa Penetapan sebuah desa sebagai pusat pertumbuhan tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan kriteria yang matang.

Penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan masukan berharga kepada pembuat kebijakan di Kabupaten Sanggau dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menangani berbagai tantangan di wilayah perbatasan. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi penting bagi pembuat kebijakan di Kabupaten Sanggau, khususnya dalam perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan wilayah perbatasan negara melalui beberapa cara seperti untuk penentuan prioritas pembangunan wilayah pengembangan desa pusat pertumbuhan ekonomi; penyusunan rencana pengelolaan perbatasan yang terintegrasi; dan penanganan ketidaksetaraan ekonomi melalui pengembangan kebijakan berbasis Data

Desa pusat pertumbuhan diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang mampu merangsang pertumbuhan di sekitarnya. Dengan memperkuat peran desa pusat pertumbuhan, diantisipasi akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan yang selama ini mungkin terabaikan dalam pembangunan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai model pengembangan desa pusat pertumbuhan pada kecamatan perbatasan negara di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hal tersebut, perlunya penelitian yang menyeluruh untuk menentukan model pengembangan desa

pusat pertumbuhan pada lingkup pemerintahan kecamatan di daerah perbatasan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sehingga dapat dihasilkan panduan yang akurat dan relevan dalam menetapkan desa pusat pertumbuhan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Desa yang berperan sebagai pusat pertumbuhan dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa faktor, antara lain potensi penduduk yang dimilikinya, tingkat aksesibilitas, infrastruktur yang komprehensif, posisi geografis yang strategis, dan dukungan dari basis ekonomi yang mencolok. Untuk mewujudkan peran desa sebagai pusat pertumbuhan, diperlukan pembentukan tata ruang wilayah yang efisien dan efektif.

Menurut Bastemeijer et al (1987), esensialnya mengadopsi sistem pengembangan desa yang berbasis keruangan. Hal ini merujuk pada usaha untuk mengintegrasikan berbagai program sektoral ke dalam kerangka konseptual tata ruang wilayah perdesaan, baik dari segi fungsional maupun teritorial. Pendekatan ini menerapkan strategi pusat pertumbuhan pada wilayah perdesaan. Proses membentuk tata ruang tersebut melibatkan penentuan pusat-pusat pengembangan (Fisher dan Shyamadas 1983), yang mengacu pada wilayah kegiatan usaha. Penilaian struktur produksi wilayah perdesaan menjadi dasar untuk mengembangkan ekonomi perdesaan secara holistik. Desa-desanya yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan merupakan satuan permukiman desa yang belum terklasifikasi sebagai perkotaan. Pemilihan desa sebagai pusat pertumbuhan diarahkan untuk mengkonsolidasikan dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat desa, dengan harapan mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan potensi serta kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Penetapan status desa sebagai pusat pertumbuhan didasarkan pada pertimbangan bahwa pertumbuhan tidak akan terjadi secara spontan di semua tempat.

Pertumbuhan mulai timbul di titik-titik tertentu yang memiliki keunggulan tertentu dengan intensitas yang berbeda. Pertumbuhan kemudian menyebar melalui saluran-saluran yang luas dan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap ekonomi secara keseluruhan. Pengaruh dari titik-titik pertumbuhan ini sangat tergantung pada efek yang mendukung (*favourable effect*) yang merembes ke wilayah sekitarnya dan efek yang tidak mendukung (*unfavourable effect*) sebagai konsekuensi dari daya tarik titik pertumbuhan tersebut. Keberadaan pusat pertumbuhan tidak hanya berpengaruh pada lokasinya sendiri, melainkan juga memiliki dampak signifikan terhadap wilayah sekitarnya. Pengaruh ini dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positif terhadap perkembangan wilayah di sekitarnya dikenal sebagai "*spread effect*", sementara dampak negatifnya disebut "*backwash effect*". *Spread effect* mencirikan pengaruh positif dari pertumbuhan pusat terhadap perkembangan ekonomi wilayah sekitarnya, sementara *backwash effect* menggambarkan pengaruh negatif yang mungkin timbul akibat adanya pusat pertumbuhan, seperti pengalihan sumber daya dan talenta dari daerah sekitarnya ke pusat pertumbuhan (Rogowska, Beata. 2021).

Menurut Tarigan (2009) bahwa suatu wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan jika memiliki 4 ciri berikut:

- a. Adanya Hubungan Internal Dan Berbagai Macam Kegiatan
- b. Adanya Efek Pengganda (*Multiplier Effect*)
- c. Adanya Konsentrasi Geografis
- d. Bersifat Mendorong Daerah Belakangnya

Keterbatasan dana pembangunan perdesaan merupakan tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat luas. Meskipun keinginan masyarakat terhadap program pembangunan perdesaan sangat beragam, dana yang tersedia masih terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi yang bijak dalam menentukan program pembangunan yang akan diimplementasikan agar dapat memenuhi kebutuhan yang paling mendesak.

Menurut Adisasmita (2006) pembangunan daerah yang berbasis pada pengembangan perdesaan meliputi banyak aspek dan tantangan yaitu menyangkut : (1) potensi sumber daya alam (SDA) pada umumnya dapat dikatakan adalah relatif cukup, sedangkan kemampuan sumber daya manusianya relatif lemah, (2)

prasarana dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian (misalnya ketersediaan sumber daya air, jaringan irigasi, jalan desa dan lainnya) masih perlu pembenahan. (3) kelembagaan ekonomi dan sosial yang telah banyak terbentuk di daerah perdesaan ternyata belum berfungsi secara optimal, (4) beberapa kelemahan dan keterbatasan lainnya misalnya akses pemasaran hasil perdesaan masih sangat lemah dan terbatas, (5) akses petani kepada fasilitas kredit (sumber daya modal) untuk pengembangan usaha perekonomian perdesaan masih relatif terbatas, (6) lainnya.

Penelitian mengenai model pengembangan desa pertumbuhan pada kecamatan perbatasan negara di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, dianalisis dengan memadukan pemikiran para ahli seperti Adisasmita R (2006), Tarigan (2009), dan Bastemeijer (1987) dengan kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

METODE

Desain penelitian deskriptif kualitatif menjadi pilihan peneliti untuk memberikan gambaran dan uraian kondisi atau fenomena yang terjadi berkaitan pada model penentuan desa pusat pertumbuhan dalam pengembangan Kecamatan dikawasan perbatasan negara secara akurat, faktual, dan sistematis mengenai fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif dimulai dengan masalah atau pertanyaan yang jelas dan berusaha untuk menyatakannya dengan jelas. Peneliti deskriptif menggunakan sebagian besar metode pengumpulan data: survei, studi lapangan, analisis isi, dan analisis sejarah komparatif (Neuman 2014).

Guna memperoleh informasi yang jelas tentang Model Desa Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Pemerintahan Kecamatan pada Daerah Perbatasan Negara di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Peneliti mengambil data di lokasi kecamatan perbatasan negara Indonesia-Malaysia yaitu di Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam yang berbatasan langsung dengan Tebedu, sebuah kota kecil setingkat kecamatan di Malaysia. Sumber informasi diperoleh dari seorang individu yang memahami masalah di lokasi penelitian seperti, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar, Staf Ahli bidang pemerintahan Ka Sanggau, Camat, dan Sekcam di kedua kecamatan lokasi penelitian dan warga masyarakat.

Data dianalisis dengan tujuan untuk mensesederhanakan data menjadi bentuk yang gampang dipahami dan ditafsirkan sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi sistematis dan akurat melalui langkah-langkah analisis berdasarkan konsep Creswell (2014) seperti (1) membuat dan menyimpan data untuk analisis; (2) membaca seluruh laporan kemudian menulis catatan khusus atau pemikiran umum tentang data yang dikumpulkan; (3) pengkodean pemrosesan objek/data menjadi segmen teks sebelum interpretasi; (4) mengembangkan tema-tema ini ke dalam kerangka konseptual; (5) mendemonstrasikan bagaimana mengulang deskripsi dan tema ini dalam teks/laporan situasi; dan (6) mengkonfirmasi apakah temuannya mengkonfirmasi atau menyangkal data sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor Desa Pusat Pertumbuhan di Kecamatan Perbatasan Kabupaten Sanggau

Analisis faktor desa pusat pertumbuhan di kecamatan perbatasan Kabupaten Sanggau, khususnya di Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam, mencakup beberapa aspek penting yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Menurut data dari BPS Kecamatan Entikong dan Sekayam tahun 2022 dan 2023, dari faktor pertama adalah aksesibilitas. Desa Entikong memiliki tingkat aksesibilitas yang sangat tinggi dibandingkan desa lain di wilayah perbatasan. Letaknya yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia menjadikan desa ini sebagai gerbang utama melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Jalan Lintas Negara yang melewati desa ini merupakan infrastruktur utama yang memfasilitasi arus barang, jasa, dan manusia. Menurut BPS Kecamatan Entikong (2023), sekitar 75% kendaraan niaga yang melintas di PLBN berasal dari kawasan sekitar Entikong, menandakan bahwa desa ini

MODEL PENGEMBANGAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN PADA KECAMATAN PERBATASAN NEGARA DI
KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(Nawawi, Irfan Setiawan, Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, Rahmawati Sururama, Dedi Kusmana)

tidak hanya strategis secara geografis tetapi juga vital dalam konektivitas internasional. Sementara, Desa Balai Karangan tetap memiliki aksesibilitas yang cukup baik melalui jalan poros kabupaten meskipun tidak berbatasan langsung dengan Malaysia seperti Entikong. Jalan tersebut menghubungkan Balai Karangan dengan desa-desa lain di Kecamatan Sekayam serta pusat Kabupaten Sanggau. BPS Kecamatan Sekayam (2023) mencatat bahwa lebih dari 60% arus distribusi barang lokal menggunakan jalur Balai Karangan, menjadikannya simpul logistik regional yang penting, terutama untuk komoditas pertanian.

Desa-desa yang memiliki akses jalan yang baik dan dekat dengan fasilitas transportasi utama, seperti Jalan Lintas Negara, cenderung lebih cepat berkembang. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang baik, jembatan yang kokoh, dan akses transportasi yang lancar, memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien serta mobilitas penduduk yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan Salmah (2018) mengidentifikasi ketersediaan infrastruktur dan potensi sebagai faktor penentu utama, dimana Desa Jembatan Kembar merupakan desa yang paling cocok untuk dikembangkan. Fernandina dkk (2023) menyoroti pentingnya aspek infrastruktur, sosial, fisik, dan ekonomi dalam menentukan pusat pertumbuhan, dengan Desa Cijeruk diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan di Kecamatan Cijeruk. Arief (2021) mengidentifikasi potensi dan ketersediaan infrastruktur sebagai faktor kuncinya, dimana Desa Madapolo Timur merupakan desa yang paling cocok untuk dikembangkan di Kabupaten Obi Utara.

Faktor kedua yang menjadi penentu desa pusat pertumbuhan di kecamatan perbatasan Kabupaten Sanggau adalah Infrastruktur. Desa Entikong telah mendapatkan perhatian besar dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pembangunan infrastruktur. Selain keberadaan PLBN modern, desa ini telah dilengkapi dengan jalan beraspal, jembatan kokoh, terminal logistik, dan sistem transportasi umum. Fasilitas telekomunikasi juga telah ditingkatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi lintas batas dan pelayanan publik. Investasi infrastruktur ini mempercepat integrasi wilayah perbatasan dengan pusat-pusat ekonomi lainnya di Kalimantan Barat. Sementara itu, Infrastruktur di Desa Balai Karangan juga berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perbaikan jalan utama desa, pembangunan pasar rakyat, serta pengadaan sistem air bersih dan listrik desa menjadi prioritas pembangunan. Meski belum sekompleks Entikong, Balai Karangan telah menunjukkan kemajuan signifikan. Jalan penghubung ke desa-desa sekitar sudah diaspal dan mampu dilalui kendaraan berat, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal.

Faktor ketiga, Potensi ekonomi utama Desa Entikong terletak pada perdagangan lintas batas. Dengan dukungan PLBN, kegiatan ekspor-impor kecil (border trade) berkembang pesat. Komoditas seperti karet, kelapa sawit, dan produk pertanian lainnya menjadi andalan ekspor lokal. BPS Kabupaten Sanggau (2023) mencatat nilai perdagangan lintas batas dari Entikong mencapai lebih dari Rp60 miliar per tahun, dan sekitar 45% penduduk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan logistik dan perdagangan. Sementara potensi ekonomi Desa Balai Karangan didominasi oleh sektor perkebunan rakyat dan UMKM. Desa ini menjadi salah satu pusat produksi karet dan kelapa sawit di Kecamatan Sekayam. Lebih dari 30% total produksi karet Kecamatan Sekayam berasal dari desa ini. Terdapat lebih dari 250 unit UMKM yang aktif di sektor perdagangan, jasa, dan pengolahan hasil pertanian. Balai Karangan juga berperan sebagai titik transit barang dan komoditas lokal menuju pasar-pasar regional.

Aktivitas perdagangan lintas batas dengan Malaysia juga memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi lokal di desa-desa perbatasan. Perdagangan ini mencakup berbagai komoditas, dari hasil bumi hingga barang kebutuhan sehari-hari. Desa-desa yang berada di dekat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti Entikong, memiliki akses yang lebih mudah untuk melakukan perdagangan lintas batas, yang memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Menurut BPS, aktivitas perdagangan lintas batas ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di wilayah perbatasan.

Desa-desa yang memiliki akses ke pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional, cenderung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dukungan infrastruktur seperti jalan yang baik dan fasilitas transportasi yang memadai sangat penting untuk memfasilitasi distribusi hasil produksi ke pasar. Pemerintah juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui berbagai program

pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Data dari BPS Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa desa-desa yang mendapatkan dukungan program pemerintah dalam hal peningkatan kapasitas ekonomi dan infrastruktur menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan dengan desa lainnya.

Perdagangan lintas batas dengan Malaysia memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal di desa-desa perbatasan, khususnya di Sarawak-Kalimantan dan Kalimantan Barat-Sarawak. Perdagangan ini menciptakan lapangan kerja, menciptakan kekayaan, dan merangsang pembangunan infrastruktur (Awang, dkk 2013). Aktivitas perdagangan di daerah tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal, khususnya yang berkaitan dengan ajaran Islam (Iswanto, 2020). Dampak ekonomi dari perdagangan ini terlihat jelas di Entikong, dimana masyarakat diuntungkan dengan tingginya harga komoditas pertanian dan kebutuhan sehari-hari karena nilai tukar mata uang, dan infrastruktur yang relatif memadai (Siburian, 2014). Pembangunan Pusat Kelautan dan Perikanan Terpadu di Sebatik diharapkan semakin meningkatkan dinamika perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia (Yanti, 2020).

Faktor ke empat terkait layanan publik, Entikong memiliki fasilitas layanan publik yang relatif lengkap. Dalam bidang pendidikan, tersedia PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Dalam bidang kesehatan, terdapat Puskesmas Entikong dengan layanan rawat inap, serta Posyandu yang aktif di setiap dusun. Tingkat partisipasi pendidikan untuk usia sekolah dasar mencapai 95%, dan layanan kesehatan dasar menjangkau lebih dari 90% penduduk (BPS Kecamatan Entikong, 2022).

Balai Karangan juga memiliki fasilitas layanan publik yang cukup baik. Terdapat lembaga pendidikan hingga tingkat SMA, dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Pembantu serta Posyandu. Tingkat partisipasi sekolah dasar mencapai 93%, dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan meningkat sebesar 15% dalam dua tahun terakhir berkat program kampanye kesehatan ibu dan anak (BPS Sekayam, 2023). Namun, layanan rujukan kesehatan masih harus dilakukan ke Puskesmas induk atau ke kota kabupaten. di Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, terdapat beberapa fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial meskipun desa ini tidak dilalui oleh Jalan Antar Negara. Hal ini menunjukkan pentingnya layanan kesehatan dalam mendukung pertumbuhan desa.

Penyediaan dan peningkatan kualitas layanan publik di Desa Entikong dan Balai Karangan juga sangat penting. Program-program pemerintah yang berfokus pada peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, seperti pembangunan sekolah baru, renovasi Puskesmas, dan pelatihan tenaga kesehatan, berkontribusi besar terhadap perkembangan desa. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga mempercepat proses transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan. Menurut BPS Kabupaten Sanggau, desa-desa yang menerima lebih banyak perhatian dan dukungan dari pemerintah cenderung lebih cepat berkembang dan menunjukkan peningkatan dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial.

Faktor kelima, dukungan kebijakan pemerintah dan program pemberdayaan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menentukan desa pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan seperti Desa Entikong dan Desa Balai Karangan di Kabupaten Sanggau. Desa Entikong merupakan prioritas nasional dalam konteks pembangunan perbatasan. Pemerintah pusat melalui BNPP dan Kementerian PUPR telah meluncurkan berbagai program seperti pembangunan pasar perbatasan, kawasan logistik terpadu, dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, program Dana Desa dan Dana Perbatasan juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas lokal dan pelayanan dasar. Kebijakan strategis ini menempatkan Entikong sebagai pusat pertumbuhan dengan dukungan kelembagaan yang kuat.

Sementara, Balai Karangan mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk program penguatan ekonomi rakyat dan pengembangan kawasan produktif. Program padat karya, bantuan pupuk dan benih unggul, pelatihan UMKM, serta pembangunan pasar desa merupakan contoh nyata intervensi kebijakan. Meski belum sebesar Entikong, komitmen pemerintah terhadap desa ini cukup tinggi, terutama dalam mengurangi ketimpangan wilayah dan memperluas pemerataan pembangunan di perbatasan. Di Desa Balai Karangan, meskipun desa ini tidak dilalui oleh Jalan Antar Negara, pembangunan jalan poros kabupaten yang menghubungkan desa ini dengan desa-desa lain di Kecamatan Sekayam serta kabupaten lainnya sangat penting. Hal ini telah membuka akses yang lebih baik untuk distribusi hasil pertanian dan perkebunan, yang

merupakan sektor ekonomi utama di desa ini. Program pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa Balai Karangan.

Identifikasi Desa Pusat Pertumbuhan di Kecamatan Perbatasan Kabupaten Sanggau

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa Desa Pusat Pertumbuhan di Kecamatan Perbatasan Kabupaten Sanggau yang memiliki potensi pertumbuhan yang pesat yakni Desa Entikong dan Desa Balai Karangan. Desa Entikong dan Desa Balai Karangan di Kecamatan Perbatasan Kabupaten Sanggau memiliki potensi pertumbuhan yang pesat meskipun dengan karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Desa Entikong terkenal karena posisinya yang strategis sebagai Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang berfungsi sebagai gerbang utama perdagangan dan mobilitas antar negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Lokasi strategis ini membuat Desa Entikong mendapatkan banyak dukungan program pembangunan dari pemerintah pusat, seperti peningkatan infrastruktur, fasilitas perbatasan yang modern, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebaliknya, Desa Balai Karangan memiliki potensi ekonomi yang kuat dan aksesibilitas yang baik, meskipun tidak terletak langsung di jalur utama perbatasan internasional. Desa ini diuntungkan dengan adanya jalan penghubung wilayah kabupaten yang memudahkan konektivitas antar desa dan kabupaten lainnya di Kalimantan Barat. Konektivitas yang baik ini membuat Desa Balai Karangan menjadi pusat perdagangan lokal yang berkembang pesat. Usaha perdagangan di desa ini terus tumbuh, didukung oleh pasar-pasar lokal yang aktif dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Untuk melihat perbandingan kedua desa tersebut selengkapnya pada Tabel berikut:

Tabel 1. Identifikasi Desa Entikong dan Sekayam

No	Dimensi	Desa Entikong	Desa Balai Karangan
1.	Kondisi Desa	Letak geografisnya yang strategis, sebagai pintu gerbang perbatasan antara Indonesia dan Malaysia,	Letak geografisnya yang strategis, berada di jalan lintas Kalimantan
	Aksesibilitas (Konektivitas)	Desa Entikong menjadi titik utama perdagangan dan mobilitas manusia, namun bersifat nasional, sehingga kurang berdampak pada desa	Desa Entikong menjadi titik utama perdagangan dan mobilitas penduduk di antar desa Kecamatan Sekayam dan kabupaten lainnya.
	Infrastruktur	Terdapat berbagai Infrastruktur Pusat dan Desa. Seperti Pendidikan, perdagangan, Kesehatan, warung di Desa Entikong	Terdapat infrastruktur Pendidikan, perdagangan, Kesehatan, warung di Desa Balai Karangan
	Ekonomi	Terdapat pusat bisnis seperti Pasar di Samping PLBN, namun tidak ramai dikunjungi Masyarakat, masyarakat menjual hasil panen/kebun di Tebedu Malaysia	Terdapat banyak ruko, toko warung, dll, aktivitas jual beli hasil panen di Pasar dan Toko
	Keberadaan Sentra Kegiatan	Terdapat berbagai sentra kegiatan pemerintahan pusat maupun lokal, dan sosial budaya masyarakat	Terdapat berbagai sentra kegiatan pemerintahan lokal, dan sosial budaya masyarakat
	Ketersediaan Layanan Publik	Tersedia Layanan Pusat dan Lokal Desa	Tersedia Layanan Lokal Desa

2.	Dukungan Kebijakan Pemerintah	Terdapat berbagai dukungan kebijakan pusat dan daerah	Terdapat berbagai dukungan kebijakan daerah
3.	Karakteristik Desa Perbatasan Negara	Berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, sehingga menjadi lokasi lintas batas barang dan orang. Tapi hanya menjadi lokasi persinggahan sebelum aktivitas lintas batas	Tidak berbatasan langsung dengan kampung Malaysia, namun menjadi pusat kegiatan Masyarakat perbatasan di Kecamatan Sekayam

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, Desa Entikong dan Desa Sekayam memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dalam berbagai aspek. Desa Entikong memiliki letak geografis yang strategis sebagai pintu gerbang perbatasan dengan Malaysia, sedangkan Desa Sekayam terletak di jalan lintas Kalimantan. Desa Entikong memiliki konektivitas yang bersifat nasional, sedangkan Desa Sekayam memiliki konektivitas lokal. Desa Entikong memiliki berbagai infrastruktur Pusat dan Desa, seperti Pendidikan, perdagangan, Kesehatan, warung di Desa Entikong, sedangkan Desa Sekayam memiliki infrastruktur Pendidikan, perdagangan. Desa Entikong memiliki pusat bisnis seperti Pasar di Samping PLBN, namun tidak ramai dikunjungi Masyarakat, masyarakat menjual hasil panen kebun di Tebedu Malaysia, sedangkan Desa Sekayam memiliki banyak ruko, toko warung, dll, aktivitas jual beli hasil panen di Pasar dan Toko. Desa Entikong memiliki berbagai sentra kegiatan pemerintahan pusat maupun lokal. dan sosial budaya masyarakat, sedangkan Desa Sekayam memiliki berbagai sentra kegiatan pemerintahan lokal, dan sosial budaya masyarakat. Desa Entikong memiliki Layanan Pusat dan Lokal Desa, sedangkan Desa Sekayam memiliki Layanan Lokal Desa. Desa Entikong memiliki berbagai dukungan kebijakan pusat dan daerah, sedangkan Desa Sekayam memiliki berbagai dukungan kebijakan daerah.

Secara umum, Desa Entikong memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi berkembang dengan pesat dibandingkan Desa Sekayam. Hal ini dikarenakan Desa Entikong memiliki letak geografis yang strategis, konektivitas yang lebih baik, infrastruktur yang lebih lengkap, dan aktivitas ekonomi yang lebih beragam. Namun, Desa Sekayam juga memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama dalam hal infrastruktur dan sentra kegiatan ekonomi lokal yang memadai serta aktivitas Masyarakat yang lebih ramai.

Model Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan Di Kecamatan Perbatasan Kabupaten Sanggau

Pengembangan desa pusat pertumbuhan merupakan salah satu strategi kunci pembangunan pedesaan, khususnya di wilayah perbatasan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan desa-desa yang memiliki potensi ekonomi signifikan, yang kemudian dapat menjadi katalisator bagi wilayah sekitarnya (Soleh, 2017). Hal ini meliputi peningkatan akses pasar, penguatan infrastruktur, dan promosi investasi lokal dan asing. Pemilihan desa pusat pertumbuhan tersebut didasarkan pada kriteria tertentu, seperti potensi ekonomi dan lokasi yang strategis (Muta'ali, 2016). Pembangunan desa-desa tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya di wilayah perbatasan (Kurniadi, 2009; Hasnin, 2019). Namun demikian, tantangan seperti dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur perlu diatasi untuk sepenuhnya mewujudkan potensi desa-desa pusat pertumbuhan tersebut (Hasnin, 2019).

Model desa pusat pertumbuhan ini tidak dirancang untuk menetapkan desa-desa baru sebagai pusat pertumbuhan, melainkan untuk memperkuat dan mengoptimalkan desa-desa yang sudah berkembang. Hal ini sebagaimana Desa Entikong dan Desa Balai Karangan di Kabupaten Sanggau adalah contoh nyata desa-desa yang telah lama berkembang menjadi pusat pertumbuhan di wilayah kecamatan perbatasan. Entikong, dengan posisinya sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN), telah lama berfungsi sebagai pintu gerbang utama untuk perdagangan dan mobilitas antar negara, yang memberikan kontribusi besar bagi ekonomi lokal. Infrastruktur yang memadai dan berbagai program pemerintah telah mendukung pertumbuhan ekonomi di desa ini.

Desa Balai Karangan, meskipun tidak berada di jalur utama Jalan Antar Negara, telah menunjukkan perkembangan pesat melalui inisiatif lokal dan dukungan infrastruktur yang memadai. Keberhasilan desa ini sebagai pusat pertumbuhan tidak hanya didasarkan pada lokasinya, tetapi juga pada kemampuan komunitasnya untuk mengembangkan usaha perdagangan dan sektor jasa. Jalan poros kabupaten yang menghubungkan desa ini dengan daerah lain telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi dan memperluas akses pasar. Pengalaman Balai Karangan menunjukkan bahwa pengembangan desa pusat pertumbuhan bisa berhasil dengan pendekatan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat.

Model desa pusat pertumbuhan ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Konsep ini didasarkan pada analisis input, proses, dan output yang holistik untuk memahami dan mengembangkan potensi desa-desa di wilayah perbatasan negara. Pada tahap input, model ini menguraikan kondisi desa, kebijakan pemerintah, dan karakteristik khusus dari desa-desa perbatasan. Kondisi desa mencakup aspek demografi, infrastruktur, dan ekonomi lokal, sementara kebijakan pemerintah melibatkan program pembangunan dan regulasi yang mendukung. Karakteristik desa perbatasan mencakup aspek geografis dan sosial yang mempengaruhi dinamika pembangunan dan interaksi lintas batas.

Pada tahap proses, faktor penentu yang mempengaruhi keberhasilan desa sebagai pusat pertumbuhan dianalisis secara mendalam. Di Kecamatan Perbatasan Kabupaten Sanggau, analisis ini mencakup penilaian terhadap potensi ekonomi, aksesibilitas, dan infrastruktur yang tersedia. Desa Entikong dan Desa Balai Karangan diidentifikasi sebagai desa pusat pertumbuhan berdasarkan kriteria tersebut. Desa Entikong, dengan posisinya sebagai PLBN, memiliki keunggulan strategis dalam perdagangan lintas batas dan dukungan infrastruktur yang kuat. Sementara itu, Desa Balai Karangan menunjukkan potensi besar dalam perdagangan lokal dan regional meskipun tidak berada di jalur utama perbatasan.

Tahap output dari model ini menghasilkan rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung dan mengembangkan desa-desa yang telah diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi ini mencakup penguatan infrastruktur, seperti peningkatan jalan dan fasilitas publik, serta program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan akses modal bagi masyarakat. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, desa-desa ini tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan wilayah perbatasan.

Analisis model pengembangan desa pusat pertumbuhan di Kecamatan perbatasan negara menunjukkan bahwa faktor kunci keberhasilan meliputi dukungan infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi, dan keterlibatan komunitas. Pembangunan yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas, seperti pembangunan jalan dan jembatan, serta penyediaan fasilitas publik yang memadai, dapat meningkatkan daya tarik desa-desa ini sebagai pusat ekonomi. Selain itu, program-program yang mendukung pengembangan keterampilan dan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan dan bantuan modal usaha, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi desa. Dengan strategi yang holistik dan terarah, desa-desa di wilayah perbatasan dapat menjadi pusat pertumbuhan yang kuat dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan wilayah secara keseluruhan, sehingga berdasarkan Input dan Proses, makat tabel output Model Desa Pusat Pertumbuhan sebagai berikut:

Tabel 2. Output Model Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan di Kecamatan Entikong dan Sekayam, Kabupaten Sanggau

No	Desa Entikong	Desa Balai Karangan
1	Mengembangkan Potensi Perdagangan Lintas Batas	Mengembangkan potensi perdagangan lokal dan regional
2	Memperkuat Infrastruktur Dasar	Memperkuat Infrastruktur Dasar

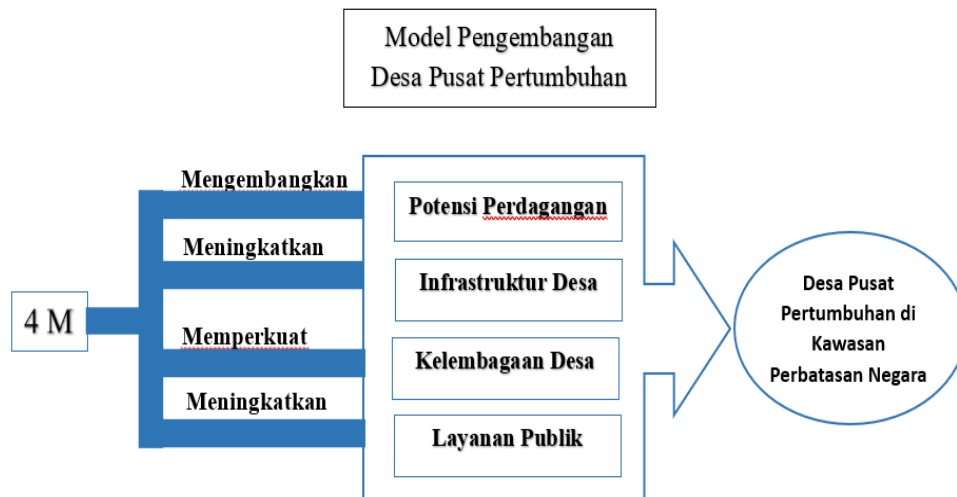
MODEL PENGEMBANGAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN PADA KECAMATAN PERBATASAN NEGARA DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(Nawawi, Irfan Setiawan, Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, Rahmawati Sururama, Dedi Kusmana)

3	Memperkuat Kelembagaan Desa	Memperkuat Kelembagaan Desa
4	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan data tabel yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat digambarkan dalam Model 4M dalam mengembangkan Desa Pusat Pertumbuhan di Kawasan Perbatasan Negara Indonesia Malaysia sehingga menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau terkait desa pusat pertumbuhan di wilayah Kecamatan perbatasan adalah sebagai berikut:



Gambar1. Model 4 M

Model pengembangan pada Desa Entikong

a) Mengembangkan Potensi Perdagangan Lintas Batas:

- 1) Memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan akses permodalan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- 2) Meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang perdagangan, seperti pasar tradisional, gudang, dan jalan usaha tani.
- 3) Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan bahasa, negosiasi, dan manajemen bisnis.
- 4) Memfasilitasi promosi produk UMKM lokal ke pasar internasional.

b) Meningkatkan Infrastruktur Desa:

- 1) Memperbaiki dan memperluas akses jalan desa untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa.
- 2) Membangun jembatan permanen untuk menghubungkan desa dengan wilayah lain.
- 3) Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan komunikasi masyarakat.
- 4) Memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat.

c) Memperkuat Kelembagaan Desa:

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan.
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa.
- 3) Memperkuat kelembagaan ekonomi desa, seperti koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB).

d) Meningkatkan Kualitas Layanan Publik:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
- 2) Memperluas akses terhadap layanan publik, seperti air bersih, sanitasi, dan listrik.

MODEL PENGEMBANGAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN PADA KECAMATAN PERBATASAN NEGARA DI
KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(Nawawi, Irfan Setiawan, Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, Rahmawati Sururama, Dedi Kusmana)

- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung layanan publik, seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

Model pengembangan pada Desa Balai Karangan

a) Mengembangkan Potensi Perdagangan Lokal Dan Regional:

- 1) Memperkuat kerjasama antar desa dan kecamatan untuk mengembangkan jaringan perdagangan lokal.
- 2) Meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang perdagangan, seperti pasar tradisional, gudang, dan jalan usaha tani.
- 3) Mengembangkan produk-produk lokal yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi.
- 4) Memfasilitasi promosi produk lokal ke pasar regional.

b) Meningkatkan Infrastruktur Desa:

- 1) Memperbaiki dan memperluas akses jalan desa untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa.
- 2) Membangun jembatan permanen untuk menghubungkan desa dengan wilayah lain.
- 3) Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan komunikasi masyarakat.
- 4) Memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat.

c) Memperkuat Kelembagaan Desa:

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan.
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa.
- 3) Memperkuat kelembagaan ekonomi desa, seperti koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB).

d) Meningkatkan Kualitas Layanan Publik:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
- 2) Memperluas akses terhadap layanan publik, seperti air bersih, sanitasi, dan listrik.
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung layanan publik, seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

Berdasarkan uraian tersebut, model desa pusat pertumbuhan ini menunjukkan pentingnya integrasi berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, infrastruktur, kelembagaan, hingga layanan publik, untuk mencapai pembangunan wilayah yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan negara. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan desa pusat pertumbuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pengembangan desa pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau memerlukan pertimbangan berbagai faktor. Pertama, potensi ekonomi desa, aksesibilitas desa, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan partisipasi dan kapasitas masyarakat serta aparatur desa serta, karakteristik geografis dan sosial desa, dianalisis untuk menentukan potensi dan tantangan yang dihadapi desa. Model desa pusat pertumbuhan dalam pengembangan pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau dapat didasarkan pada analisis input, proses, dan output.

Pada tahap input, data mengenai kondisi desa, kebijakan pemerintah, dan karakteristik khusus desa perbatasan harus dikumpulkan dan dianalisis. Pada tahap proses, faktor-faktor penentu desa pusat pertumbuhan, seperti potensi ekonomi, aksesibilitas, dan ketersediaan infrastruktur, dievaluasi secara mendalam. Desa Entikong dan Balai Karangan di Kabupaten Sanggau memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan. Entikong unggul dalam aksesibilitas karena keberadaan PLBN dan Jalan Lintas Negara, infrastruktur modern, serta aktivitas perdagangan lintas batas yang kuat. Balai Karangan juga

MODEL PENGEMBANGAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN PADA KECAMATAN PERBATASAN NEGARA DI
KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(Nawawi, Irfan Setiawan, Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, Rahmawati Sururama, Dedi Kusmana)

berkembang melalui konektivitas regional, sektor perkebunan, UMKM, dan dukungan kebijakan pemerintah. Kedua desa memiliki layanan publik yang memadai serta program pemberdayaan dari pusat dan daerah. Dukungan infrastruktur, ekonomi lokal, dan pelayanan dasar yang baik mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial, menjadikan keduanya sebagai simpul strategis pembangunan perbatasan Kalimantan Barat.

Pada tahap output, rekomendasi Model 4M dalam mengembangkan Desa Pusat Pertumbuhan di Kawasan Perbatasan Negara Indonesia Malaysia sehingga menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau terkait desa pusat pertumbuhan di wilayah Kecamatan perbatasan. Implementasi model ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agnew, John, 2008, *Borders on the mind: reframing border thinking*, Department of Geography, UCLA, USA
- Arief, R., Abdul, A., Salim Rasyidi, E., & Latief, R. (2021). Studi Penentuan Kawasan Terpilih Pusat Pengembang Desa Pertumbuhan di Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(1), 096-109. <https://doi.org/10.35965/jups.v2i1.34>
- Arifin, Saru, 2014, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Jakarta, Sinar Grafika
- Awang, Abd Hair; Sulehan, Junaenah; Abu Bakar, Noor Rahamah; Abdullah, Mohd Yusof; Liu, Ong Puay, 2013, *Informal Cross-Border Trade Sarawak (Malaysia)-Kalimantan (Indonesia): A Catalyst for Border Community's Development*, *Asian Social Science (ASS)* Vol. 9, No. 4, <https://doi.org/10.5539/ass.v9n4p167>
- Bastemeijer, T. et al. 1987. *An Approach to Rural Center Planning in the Framework of Integrated Regional Development*. Departement of Civil Engineering, University of Technology, Delf. The Netherlands
- Creswell, Jhon. W. 2014. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Fauzi, Dea Triana, 2016, *Fenomena Masalah Lintas Batas Indonesia Papua Nugini Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Papua Nugini*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAS. <http://repository.unpas.ac.id/571/>
- Fernandina, M., Mujio, M., Septiawan, Y., Hidayat, J. T., Armadi, D. A., Ningsih, N. W Nugraha, H., Rahayu, R. A., & Sari, D. K. (2023). Penentuan Pusat Pertumbuhan Sebagai Arahan Pengembangan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 7(2), 9–23. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i2.368>
- Fisher, H. B. dan Shyamadas. 1983. *Hierarchical Location Analysis for Integrated Area Planning : Experience of the pilot Research Project in Growth Centers, India*. Paper presented in the 1983 Regional Science Congress in Vienna
- Hasnin, Muhammad, (2018), *Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Pulau Morotai Dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara*, *Humano: Jurnal Penelitian*, Vol 9, No 2
- Iswanto, B., Munadi, M., & Suriadi, S. (2020). *Uncover Local Wisdom Value Of Trade At The Border Of Indonesia-Malaysia: An Islamic Economics Perspective*. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Johannes, A. (2019). Penanganan Masalah-Masalah Sosial Di Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(2), 50-61. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i2.763>
- Kurniadi, Dendy. 2009. "Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, Universitas Diponegoro, Semarang, <http://eprints.undip.ac.id/24152/>
- Marihandono, Djoko. 2011. *Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat: Sumber Sejarah dan Permasalahannya*. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 1, no. 2 (July). 10.17510/paradigma.v1i2.10.

- Mahdi, Acan, 2016, Agenda Media terhadap Isu Perbatasan Kalimantan Barat pada Harian Pontianak Post dan Tribun Pontianak, Jurnal Al-Hikmah, Vol 10, No
- Muta'ali, Luthi Luthi, 2003, Studi Penentuan Desa-Desa Pusat Pertumbuhan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Majalah Geografi Indonesia, Vol 17, No 1,
- Neuman, W. Lawrence. 2014. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Seventh Edition. Boston: Allyn and Bacon. <http://letrunghieutvu.volasite.com/resources/w-lawrence-neuman-social-research-methods-qualitative-and-quantitative-approaches-pearson-education-limited-2013>
- Rogowska, Beata. (2021) Potyczki metodologiczne Gunnara Myrdala. Optimum. Economic Studies. DOI: 10.15290/oes.2021.01.103.07
- Salmah, Emi; Sahri, & Astuti, Endang, (2018). Analisis Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan Di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Journal of Economics and Business, 4(2), 18 - 33. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v4i2.20>
- Siburian, R. (2002). Entikong: Daerah Tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak. Antropologi Indonesia 67, hal. 89. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i67.3431>
- Setiawan, I., & Madjid, U. (2022). Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Negara Di Entikong, Kabupaten Sanggau. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 7(2), 121-132. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i2.2918>.
- Soleh, Ahmad (2017), Strategi Pengembangan Potensi Desa, Jurnal Sungkai, Vol. 5 No. 1, 32-52, DOI: <https://doi.org/10.30606/js.v5i1.1181>
- Tarigan, Robinson. (2009). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara. Jakarta
- Taylor, D.R.F. 1981, Roles and Function of Lower Order Centers in Rural Developmen In Fu Chen Lo (ed), Rural-Urban Relations and Regional Development. Maruzen Asia, Nagoya, Japan.
- Tribunnews.com, Kepala Kantor Imigrasi Entikong Sebut ada 19 'Jalan Tikus' yang Rawan di Perbatasan, <http://pontianak.tribunnews.com/2019/01/19/kepalakantor-imigrasi-entikong-sebutada-19-jalan-tikus-yang-rawan-diperbatasan> ugm.ac.id, Posisi Kelembagaan, Kendala Dalam Mengelola Perbatasan Negara, berita tanggal, 05 Juni 2013, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/7880-posisi-kelembagaan-kendaladalam-mengelola-perbatasannegara>.
- ugm.ac.id, Posisi Kelembagaan, Kendala Dalam Mengelola Perbatasan Negara, berita tanggal, 05 Juni 2013, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/7880-posisi-kelembagaan-kendala-dalam-mengelola-perbatasan-negara>.
- Yanti, B.V., & Muawanah, U. (2020). Dinamika Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas Antara Indonesia Dan Malaysia Dan Pengembangan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik Di Kalimantan Utara, Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol 10, No 1, <https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8318>